

**PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA
BERBASIS KURIKULUM MERDEKA TERHADAP KEDISIPLINAN SISWA
DALAM MENAATI TATA TERTIB SEKOLAH DI SMP TRI JAYA MEDAN**

Putri Jesika Yolanda¹, Sampitmo Habeahan², Majda El Muhtaj³,
Surya Dharma⁴, Jamaludin⁵

¹⁻⁵Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS, Universitas Negeri Medan
Pjesika193@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to test the significance of the influence of the implementation of Pancasila Education learning based on the Independent Curriculum on student discipline in obeying the rules at Tri Jaya Medan Middle School. Using a quantitative correlational approach with an Ex-Post Facto explanatory design, this study included the entire active population through a total sampling technique of 98 students. Primary data collection was executed through a Likert-scale questionnaire instrument (28 valid and reliable items; $\alpha > 0.800$), supported by triangulation of field observation methods and documentation extraction. The results of the statistical prerequisite test confirmed that the distribution of residual data was normally distributed (Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov $0.897 > 0.05$) and had a linear line projection (Sig. Deviation from Linearity $0.362 > 0.05$). Simple linear regression analysis produced a deterministic formulation $Y = 10.245 + 0.784X$. Partial hypothesis testing (t-test) convincingly rejects H_0 and accepts H_a , as evidenced by the calculated t_{ratio} (8.790) exceeding the t_{table} (1.984) at an absolute significance level of $0.000 < 0.05$. The recorded coefficient of determination (R^2) value of 0.446 indicates that the pedagogical quality intervention provides a causal contribution of 44.6% to fluctuations in student discipline compliance, while the residual margin of 55.4% is explained by external sociological determinants beyond the model's scope. This study concludes that the adoption of participatory methods such as Project Citizen and the optimization of educators' role models have successfully reconstructed the student paradigm; changing obedience based on coercive fear into an autonomous constitutional awareness that values the protection of Human Rights (HAM).

Keywords: Pancasila Education, Independent Curriculum, Student Discipline, Compliance with Rules and Regulations, Project Citizen.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis Kurikulum Merdeka terhadap kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib di SMP Tri Jaya Medan. Menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan desain ekplanatori Ex-Post Facto, penelitian ini mengikutsertakan seluruh populasi aktif melalui teknik total sampling sebanyak 98 siswa. Pengumpulan data primer dieksekusi melalui instrumen angket berskala Likert (28 butir valid dan reliabel; $\alpha > 0,800$), didukung oleh triangulasi metode observasi lapangan dan ekstraksi dokumentasi. Hasil uji prasyarat statistik mengonfirmasi bahwa sebaran data residual berdistribusi normal (Asymp. Sig.

Kolmogorov-Smirnov $0,897 > 0,05$) dan memiliki proyeksi garis yang linier (Sig. Deviation from Linearity $0,362 > 0,05$). Analisis regresi linier sederhana menghasilkan formulasi deterministik $Y = 10,245 + 0,784X$. Pengujian hipotesis parsial (Uji-t) secara meyakinkan menolak H_0 dan menerima H_a , dibuktikan dengan rasio t_{hitung} (8,790) yang melampaui t_{tabel} (1,984) pada level signifikansi absolut $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang tercatat sebesar 0,446 mengindikasikan bahwa intervensi kualitas pedagogis memberikan kontribusi kausal sebesar 44,6% terhadap fluktuasi kepatuhan tata tertib siswa, sementara margin residu sebesar 55,4% dijelaskan oleh determinan sosiologis eksternal di luar jangkauan model. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengadopsian metode partisipatif seperti Project Citizen dan optimalisasi keteladanan pendidik berhasil merekonstruksi paradigma siswa; mengubah ketaatan berbasis ketakutan koersif menjadi kesadaran konstitusional otonom yang menghargai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila, Kurikulum Merdeka, Kedisiplinan Siswa Kepatuhan Tata Tertib, Project Citizen.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam membentuk karakter generasi muda yang berorientasi pada nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial kewarganegaraan. Di Indonesia, Pancasila diposisikan sebagai landasan filosofis utama yang menuntun arah pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan gagasan komprehensif bahwa Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila secara esensial dirancang untuk menyiapkan generasi muda agar mampu mengambil peran sebagai warga negara yang cerdas (*civic knowledge*), terampil (*civic skills*), dan berwatak atau berkarakter kuat (*civic disposition*) (Wahyudi &

Setiawan, 2020). Transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka menuntut pendekatan holistik yang mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan nyata; mengubah Pendidikan Pancasila dari sekadar mata pelajaran hafalan menjadi instrumen rekayasa sosial dalam rangka memperkuat Profil Pelajar Pancasila (Pendidikan et al., 2022).

Dalam realitas pembentukan karakter di lingkungan institusi pendidikan, kedisiplinan memegang peranan yang sangat krusial. Kedisiplinan adalah modal utama bagi keberhasilan akademik dan interaksi sosial. Siswa yang memiliki kedisiplinan tinggi identik dengan bagaimana cara mereka menaati

aturan seperti mengenakan seragam yang sesuai, menepati jadwal, serta mematuhi tata tertib sekolah dengan perasaan sukarela dan tanpa paksaan. Lebih dari sekadar ketertiban, kedisiplinan sejatinya adalah manifestasi nyata dari kesadaran akan Hak Asasi Manusia (HAM). Aturan dan tata tertib pada hakikatnya adalah cerminan dari pengakuan atas martabat dan hak individu lain yang menjadi fondasi keadilan di masyarakat (El-Muhtaj et al., 2008). Pemaksaan ketertiban lewat tata tertib sekolah adalah pengondisian moral agar satu individu tidak melanggar batasan hak kenyamanan belajar individu lainnya (Muhtaj, 2007).

Sayangnya, tantangan degradasi kedisiplinan dan moral siswa saat ini telah menjadi krisis multidimensional di tingkat nasional. Kondisi ini terekam dengan jelas dalam rilis data empiris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada tahun 2023, KPAI mencatat tingginya angka pelanggaran hak dan moralitas anak dengan total 2.355 kasus, di mana 861 kasus di antaranya secara spesifik terjadi di lingkungan pendidikan (Indonesia, 2019). Berbagai kasus pelanggaran

tata tertib bermuara pada kenakalan ekstrem seperti perundungan (bullying) dan kekerasan fisik, yang mengindikasikan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil menanamkan *civic disposition* sebagai pengendali perilaku siswa di sekolah (Arodani et al., 2025)

Persoalan krisis kedisiplinan ini juga termanifestasi secara nyata di tingkat daerah, khususnya di Kota Medan. Dinamika kenakalan dan pelanggaran disiplin remaja bahkan mendorong turun tangannya aparat ketertiban untuk memberikan pembinaan langsung ke berbagai sekolah menengah guna menekan angka indisipliner (Pemko, 2021). Secara lebih spesifik, kondisi serupa ditemukan pada lokasi penelitian di SMP Tri Jaya Medan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara pendahuluan pada tahun 2024, ditemukan berbagai anomali ketidakdisiplinan yang mengganggu iklim akademik. Pelanggaran tata tertib yang menjadi sorotan utama meliputi: (1) keterlambatan hadir (datang melewati pukul 07.15 WIB) bahkan saat guru telah berada di kelas; (2) ketidakpatuhan dalam menggunakan atribut kelengkapan seragam sekolah; (3) kebiasaan bolos

atau keluar kelas pada jam pergantian pelajaran; (4) pengabaian penyelesaian penugasan; dan (5) perilaku destruktif seperti bermain gawai dan tidak fokus saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. Fenomena ini menjadi bukti sah bahwa siswa SMP Tri Jaya Medan cenderung menyikapi tata tertib semata-mata sebagai paksaan administratif, bukan sebagai nilai kepatuhan yang harus diinternalisasi.

Untuk menjembatani kesenjangan kepatuhan tersebut, kualitas dan intervensi pembelajaran Pendidikan Pancasila memegang peran determinan. Hukuman atau sanksi terhadap pelanggar tata tertib terbukti hanya memberikan efek kejut sementara (*shock therapy*); sehingga habituasi perilaku melalui pendampingan moral dalam pembelajaran jauh lebih efektif (Yunita, 2024). Penelitian terkini menunjukkan bahwa penerapan Pendidikan Pancasila melalui metode partisipatif memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan siswa (Sunaryati et al., 2025). Internalisasi kedisiplinan ini akan jauh lebih optimal jika guru mampu mengimplementasikan model

seperti *Project Citizen*, yang mendorong siswa memiliki tanggung jawab memecahkan masalah pelanggaran di sekitarnya secara nyata (Dharma & Siregar, 2014).

Selain itu, pembentukan mentalitas kepatuhan hukum juga perlu mengadopsi nilai-nilai tenggang rasa dan kearifan lokal (Setiawan & Rachman, 2020). Guru Pendidikan Pancasila dituntut untuk bertransformasi tidak hanya sebagai pentransfer pengetahuan konstitusi, melainkan harus berperan aktif sebagai konselor hak asasi di sekolah yang menumbuhkan kesadaran hukum secara preventif (Wahyudi & Hadiningrum, 2025). Kebiasaan mematuhi tata tertib kecil di sekolah pada akhirnya menjadi pondasi awal dalam melahirkan budaya demokrasi dan kepatuhan hukum nasional yang mapan bagi siswa di masa depan (Hodriani et al., 2025).

Lebih dari sekadar instrumen pengubah perilaku siswa, keberhasilan implementasi Pendidikan Pancasila juga sangat ditentukan oleh tingkat kedisiplinan yang ditunjukkan oleh figur pendidik itu sendiri. Keteladanan dan kedisiplinan seorang guru Pendidikan Pancasila dalam mengelola

pembelajaran sehari-hari secara langsung memberikan dampak psikologis yang positif, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan penanaman nilai moral serta peningkatan hasil belajar siswa secara komprehensif (Safitri et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan karakter siswa di institusi pendidikan mutlak harus diiringi dengan pengkondisian keteladanan pendidik secara berkesinambungan.

Selain peranan keteladanan pendidik, proses pembelajaran yang efektif menuntut adanya pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam praktik kehidupan nyata. Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila sejatinya bukan sekadar transfer wawasan secara teoretis, melainkan sebuah proses pembudayaan perilaku kewarganegaraan yang mensyaratkan adanya sinergi yang utuh antara materi di ruang kelas dengan ketaatan terhadap sistem regulasi dan tata tertib sekolah. Melalui sinergi pembelajaran tersebut, upaya pemaksaan ketaatan terhadap tata tertib pelan-pelan akan bergeser menjadi sebuah kesadaran tanggung jawab yang tumbuh dari dalam diri setiap siswa.

Berdasarkan latar belakang masalah empiris yang kuat, kesenjangan teoretis, serta kebutuhan akan pembuktian statistik di atas, maka peneliti memandang sangat mendesak untuk melakukan pengujian akademis guna melihat seberapa besar efektivitas pembelajaran nilai dalam mereduksi dekadensi kedisiplinan. Rencana investigasi ini dituangkan secara utuh dalam skripsi berjudul: **“Pengaruh Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis Kurikulum Merdeka Terhadap Kedisiplinan Siswa Dalam Menaati Tata Tertib Sekolah di SMP Tri Jaya Medan”**.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan instrumen angket. Metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, karakteristik, perilaku, dan hubungan antarvariabel (Hardani et al., 2020). Melalui metode ini, tingkat signifikansi pengaruh intervensi pedagogis guru Pendidikan Pancasila terhadap kepatuhan tata tertib dapat dibuktikan secara matematis, bukan

sekadar asumsi deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Validasi matematis yang mengokohkan penerimaan Hipotesis Alternatif (H_a) melalui regresi linier di subbab sebelumnya tidak dirancang untuk dibiarkan berhenti sebagai deretan angka-angka mati. Signifikansi statistik tersebut justru harus ditransmutasikan menjadi pijakan krusial bagi bangunan analisis kualitatif yang lebih holistik dan ekstensif. Keberhasilan riset dalam membuktikan 44,6% persentase kausalitas secara tidak langsung memicu determinasi sejumlah diskursus akademik mengenai struktur rekayasa moral (*moral engineering*) dan tata kelola sosiologis siswa di era transisi menuju Kurikulum Merdeka.

Tingginya agregat empiris Pembelajaran Pendidikan Pancasila (dengan mean skor mencolok 46,35 dari populasi 98 sampel siswa) secara organik memiliki daya resiliensi dan korelasi yang sangat kuat dengan menyusutnya anomali perilaku pelanggaran normatif, baik dalam hal presensi kedatangan di gerbang sekolah maupun komitmen kepatuhan pemakaian atribut kemeja. Secara

terperinci, pembahasan hasil ini diurai melalui empat dimensi dialektika konseptual utama yang bersinergi dengan fondasi kerangka teoretis.

1. Transformasi Paradigmatik dari “Hukuman Kejut” Menuju “Kesadaran Konstitusional”

Sumbangsih temuan paling fundamental yang berhasil dielaborasi dari penelitian ini adalah terekamnya fenomena transformasi epistemologi dan ontologi pembelajaran. Secara historis, krisis pelanggaran seperti keterlambatan konstan (datang melampaui batas toleransi 07.15 WIB) atau pemakaian gawai telepon pintar secara ilegal kerap diatasi dengan metode pemadaman api sesaat, yang populer disebut sebagai *shock therapy* atau intervensi hukuman badan (*corporal punishment*).

Namun, melalui bedah dokumentasi modul ajar dan observasi kinerja guru Pendidikan Pancasila di SMP Tri Jaya Medan, terekam fakta empiris bahwa pendidik saat ini mengeksplorasi potensi pelanggaran Kurikulum Merdeka dengan mensubstitusi ceramah indoktrinatif menjadi metode instruksional berbasis partisipatif, terutama implementasi model *Project Citizen* atau pembelajaran berbasis

proyek riil. Ketika suasana kelas dikonversi fungsinya dari doktrin hafalan butir-butir pasal konstitusi menuju bedah bedah kasus pelanggaran sosial yang otentik, terjadi lonjakan akselerasi kesadaran kognitif siswa atas urgensi instrumen Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam paradigma modul Pendidikan Pancasila modern, eksistensi pemaksaan aturan (tata tertib) dideskripsikan secara filosofis kepada siswa, bukan lagi sebagai manifestasi pembatasan otoritarian terhadap kebebasan dan kreativitas, melainkan sebagai rasionalisasi logis atas keadilan bahwa batas kebebasan dan kenyamanan satu individu mutlak dipagari oleh rasa aman individu lain dalam komunitas. Lonjakan angka koefisien R^2 sebesar 44,6% sejatinya merupakan manifestasi dari produk kompromi tersebut; terjadi internalisasi empati sosiologis di mana siswa tidak lagi patuh pada tata tertib sekolah hanya karena bayang-bayang ketakutan terhadap otoritas guru piket (*extrinsic motivation*), melainkan secara sadar mematuhi peraturan dari dalam diri sendiri (*intrinsic constitutional obedience*).

2. Otoritas Didaktik dan Reposisi Keteladanan Moral Pendidik

Kisi-kisi instrumen kuesioner yang disebar kepada responden secara spesifik didesain untuk membedah dimensi variabel eksogen melalui indikator "Keteladanan Moral Guru". Hasil tabulasi memotret keterkaitan korelasi linier yang luar biasa kuat pada indikator teladan, mengafirmasi tesis fundamental sosiologi pendidikan kewarganegaraan bahwa seorang pendidik modern dilarang bertindak hanya sebagai penyalur bank pengetahuan wawasan kebangsaan (*civic knowledge*). Guru Pendidikan Pancasila wajib memvalidasi legitimasi keilmuan konstitusionalnya melalui sikap dan afeksi operasional sehari-hari (*civic disposition*).

Pengamatan empiris mendapati sebuah fenomena unik di lingkungan SMP Tri Jaya Medan: dominasi dan kepatuhan sukarela siswa melonjak secara drastis manakala guru secara faktual mempertontonkan kedisiplinan waktu dan integritas bertutur kata saat berinteraksi di ruang publik (kelas maupun kantin). Secara nalar psikologis, perbaikan indeks kepatuhan pada aturan atribut seperti

paksaan memasukkan kemeja atau larangan memodifikasi seragam bawahan menjadi mode kekinian tercapai lebih kilat dan damai melalui mekanisme mimikri keteladanan.

Peserta didik yang berada pada siklus remaja (usia SMP) tengah mengalami turbulensi ego identitas, sehingga mereka menjelma menjadi detektor inkonsistensi yang sangat kritis terhadap orang dewasa di sekitarnya. Keteladanan kedisiplinan yang diproyeksikan secara konsisten oleh guru secara serta-merta mengelevasi status pedagogis mereka menjadi "konselor HAM" *de facto*. Fakta tersebut terlegitimasi dari distribusi regresi Variabel X, di mana item kuesioner yang berorientasi *favorable* terhadap keteladanan guru menjadi motor utama dalam mendongkrak total signifikansi regresi terhadap Variabel Y (Kedisiplinan Kehadiran dan Penggunaan Atribut).

3. Penetrasi Media Interaktif Sebagai Demarkasi Kontrol Distraksi Digital (Gawai)

Dinamika pendidikan di abad ke-21 tidak bisa dilepaskan dari krisis penggunaan gawai. Pada fase pra-penelitian di SMP Tri Jaya Medan, pemakaian telepon pintar untuk kegiatan bermain *game* daring secara

klandestin yang merusak fokus saat jam pergantian pelajaran sempat menjadi momok indisipliner kronis. Menariknya, instrumen pembelajaran Pendidikan Pancasila berhasil meredam defisit konsentrasi ini bukan dengan pendekatan usang semacam *sweeping* (razia) dan penyitaan radikal, melainkan merevolusi gawai itu sendiri dengan mengintegrasikannya ke dalam silabus modul ajar partisipatif.

Injeksi literasi digital yang masif, penyajian media interaktif, hingga *game-based learning* dan kuis visual terintegrasi mendorong siswa secara afektif lebih disibukkan untuk mengelola proyek kolaboratif bersama teman sebayanya alih-alih mengalihkan impuls kepada aplikasi hiburan nirfaedah. Model intervensi ini menegaskan dalil dari penelitian terdahulu yang relevan dalam Bab II; bahwa efektivitas resolusi indisipliner tidak dilahirkan dari represi, tetapi pelibatan aktif siswa dalam sistem. Data *anova* secara tak terbantahkan mengafirmasi bahwa pengelolaan kelas yang memfungsikan medium interaktif secara proaktif justru menekan frekuensi perilaku penyimpangan (*cyber-loafing* atau perilaku tak responsif di kelas) menuju

tingkat yang sangat minimal. Perilaku respek dan tata krama interaksional yang terbangun melalui *habitiasi* di episentrum kelas, lambat laun teresidu dan ditiru siswa pada saat mereka melangkah menuju ruang ekosistem publik lain di sekolah.

4. Heterogenitas dan Residu Pengaruh Eksternal (Analisis Kesenjangan Determinasi)

Mendedah secara presisi angka 44,6% dari persentase koefisien determinasi (R^2), meniscayakan munculnya konklusi eksistensial pada derajat diskursus kedua (*second-order insight*) yang vital bagi ekologi holistik pendidikan. Angka metrik tersebut pada satu sisi memvalidasi kepiawaian Kurikulum Merdeka dan efektivitas kompetensi pendidik, namun secara simultan justru memitigasi bahkan menggugurkan klaim bombastis bahwa intervensi sekolah adalah satu-satunya entitas absolut pembentuk karakter paripurna siswa.

Adanya defisit sisa varians determinan yang mencapai besaran 55,4% memberikan penjelasan saintifik bahwa rekam jejak penyimpangan tata tertib pada sekolah menengah berstatus swasta akar permasalahannya bermuara jauh

melampaui kurikulum intrakurikuler dan dinding kelas. Elemen krusial pembentuk sisa 55,4% ketaatan yang kosong ini terdisrupsi oleh konstelasi lingkungan. Faktor demografis kesenjangan ekonomi di sekitar wilayah domisili siswa, pergeseran pola pengasuhan asimetris yang diterapkan orang tua di rumah, intensitas paparan budaya populer dari jejaring media sosial (termasuk glorifikasi pelanggaran aturan sebagai tren), serta daya tekan normatif dari ekosistem pertemanan (*peer group validation*) secara kumulatif berkontribusi memberikan andil masif terhadap lahirnya deviasi perilaku indisipliner.

Secara politis dan fungsional diaolikasikan sebagai “gerbang pembuka dialog” belaka. Pergeseran paradigma memerlukan peleburan fusi komrehensif, yakni konsolidasi trisula sentra pendidikan: kolaborasi interaktif antara institusi penyedia layanan pendidikan (tenaga pendidik dan manajemen sekolah), komitmen pengawasan parenting dari orang tua, dan dukungan kohesif dari ketertiban komunul kemasyarakatan lokal. Pembangunan instrumen tata tertib yang bersifat mengikat harus didongkrak secara sinkron, sejajar,

dan berkesinambungan dengan model hukuman sanksi edukatif yang dikonseptualisasikan dan diajarkan di dalam modul Pendidikan Pancasila.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Holistik Implementasi Kurikulum Merdeka: Proses pengaplikasian pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Tri Jaya Medan secara empiris terbukti telah mengalami revolusi dari paradigma feodalistik konservatif menuju paradigma konstruktivis-partisipatif. Pemilihan strategi instruksional *Project Citizen*, keteladanan moral dari pendidik di lingkungan harian, serta proses pengajaran rasionalisasi Hak Asasi Manusia (HAM) bukan sebagai indoktrinasi kosong melainkan diskusi nalar, memicu impresi kognitif yang tajam. Hasilnya, tanggapan sampel mengukur indeks kelayakan dengan rerata skor mutlak 46,35

dari maksimal ideal 56 (predikat kategori tinggi/sangat baik).

2. Kausalitas Linier Mutlak Berseberangan: Melalui uji eksplanatori komprehensif (*simple linear regression*), disahkan secara matematis eksistensi arah hubungan kausalitas yang positif ($b = 0.784$) dengan koefisien kemiringan tegak yang berdaya signifikan sangat kuat ($t_{hitung} 8.790 > t_{tabel} 1.984$; sig. Parameter $p = 0.000 < 0.05$). Realitas parameter numerik ini melahirkan keputusan penolakan yang tidak dapat diganggu gugat atas Hipotesis Nihil (H_0), dan melegitimasi secara bulat penerimaan terhadap Hipotesis Alternatif (H_a). Hubungan interaksi koheren tercipta dari besarnya dedikasi guru menyuntikkan muatan afektif Pendidikan Pancasila berbanding lurus dengan kematangan resiliensi ketaatan siswa pada instrumen pedoman tata tertib harian.

3. Persentase Konstruksi Determinasi Afektif: Kinerja kualitas pedagogis dan kepiawaian guru dari pembelajaran Pendidikan Pancasila mampu mendominasi,

meramalkan, dan mendelegasikan porsi representasinya sebesar 44,6% terhadap rekayasa pengubahan profil ketertiban siswa secara total. Hal ini meliputi domain disiplin ketat presensi waktu batas jam 07.15 WIB, kepatuhan integrasi identitas seragam visual, penekanan masif atas invasi dan sabotase atensi oleh gawai pribadi di tengah KBM, serta restorasi kultur tanggung jawab etos kerja pada tugas akademik yang dibebankan. Sebesar 55,4% sisanya direpresentasikan oleh derivasi *noise* lingkungan (keluarga, teman, ekosistem swasta kota).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Arodani, M. P., Armadi, A., & Zainuddin, Z. (2025). Analisis faktor kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah dasar. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 266–274.
- Baumann, C., & Krskova, H. (2016). *School discipline, school uniforms, and academic performance. International Journal of Educational Management*, 30(6), 1003–1029.
- Dharma, S., & Siregar, R. (2014). Internalisasi Karakter melalui Model Project Citizen pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 132–137.
- El-Muhtaj, M., Arinanto, S., & Kasim, I. (2008). Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya. (No Title).
- Halking. (2024). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Panduan Pembelajaran Mata Kuliah). Unimed Publishers.
- Hardani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hodriani, H., Halking, H., Dharma, S., Nainggolan, M., & Junaidi, J. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran PKn dengan Pendekatan Dilema Moral Berbasis Android Berbantuan *Augmented Reality*. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 233–250.
- Indonesia, K. P. A. (2019). Laporan kinerja KPAI–2017.
- Mabuka, O. (2021). Tata tertib sekolah berperan sebagai pengendali perilaku siswa di SD Inpres Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(2), 360–372.
- Muhtaj, M. El. (2007). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002.
- Musbikin, I. (2021). Pendidikan

- karakter disiplin. Nusamedia.
- Pemko, M. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021.
- Pendidikan, K., Kebudayaan, R., & Indonesia, T. R. (2022). Panduan implementasi kurikulum merdeka. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Rachman, F., Taufika, R., Kabatiah, M., Batubara, A., Pratama, F. F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Pelaksanaan kurikulum ppkn pada kondisi khusus pandemi covid-19. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5682–5691.
- Rizky, A. M., Apriliani, A., Putri, D. S., Zacky, F. M., Lubis, J. U., Limbong, S. P., Jamaludin, J., & Yunita, S. (2025). Penguatan Kompetensi Profesionalisme Guru pada Era Digital di SMP Taman Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 3(2), 164–169.
- Safitri, I., Hasibuan, R. S., Saragih, T. J. R., Panjaitan, N. A., Sembiring, V. U., Simanjuntak, S. S., & Batubara, A. (2023). Peran Guru PPKn Meningkatkan Moral Peserta Didik Melalui Asesmen Profil Pelajar Pancasila di Sekolah (Stu Kasus: Peran Guru PPKn di SMA Negeri 5 Medan). *Jurnal PPKn: Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(2), 9–16.
- Salim, S. D. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif. In Citapustaka Media Bandung.
- Setiawan, D., & Rachman, F. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Kearifan Lokal Berwawasan Global. CV. Format Publishing.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo. In Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunaryati, T., Fuadah, G., Ramadhani, A. O., Andriani, E., Wulandari, I., & Nuraeni, C. (2025). Pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan perilaku sosial siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(1).
- Wahyudi, A., & Hadiningrum, S. (2025). *Legal Awareness for Pancasila and Civic Education (PPKn) Teachers as Human Rights Counselors at Gajah Mada Senior High School, Medan. International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2025)*, 305–312.
- Wahyudi, A., & Setiawan, D. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Moral dan Karakter. CV. AA. Rizky.
- Wahyudi, A., Siregar, M. F., Yunita, S., Siagian, L., & Nababan, R. (2021). Rambu Rambu Menulis Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (dan Skripsi). CV. Format Publishing.
- Yasa, I. W. P., Hadi, I. G. A. A., & Dwipayana, M. (2023). *ICLSSE 2023: Proceedings of the 5th International Conference on Law, Social Sciences and Education, ICLSSE 2023, 1st June 2023, Singaraja, Bali, Indonesia. European Alliance for Innovation*.
- Yunita, S., dkk (2024). Studi kasus tentang implikasi hukuman

terhadap kedisiplinan siswa.
Jurnal Riset Rumpun Ilmu
Pendidikan, Vol. 3 No. 2 (2024):
Oktober : Jurnal Riset Rumpun
Ilmu Pendidikan, 31–44.
[https://prin.or.id/index.php/JUR
RIPEN/article/view/4350/3407](https://prin.or.id/index.php/JURRIPEN/article/view/4350/3407)

Zai, E. P., Lase, I. W., Harefa, E.,
Gulo, S., & Duha, M. M. (2024).
Implementasi Nilai Pendidikan
Karakter Dalam Pembelajaran
PKn di Sekolah Dasar.
Innovative: Journal Of Social
Science Research, 4(1), 6677–
6691.